



# REVIEW RENSTRA

**TAHUN 2016-2021**

*Lampiran Peraturan Walikota Blitar No 23 Tahun 2018  
tentang  
Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar No 81 Tahun  
2016  
tentang  
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar*

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR**

JL. KENARI 110 No. Telp. 0342 – 801989, Fax 0342 – 815441  
e-mail : [dishub@blitarkota.go.id](mailto:dishub@blitarkota.go.id) website : <http://dishub.blitarkota.go.id>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...*

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Blitar periode 2016-2021 dapat terselesaikan.

Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kota Blitar dan bersifat indikatif. Dengan tersusunnya Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini, diharapkan dapat menjadi arah dan acuan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perhubungan di kota Blitar, baik dari unsur aparatur itu sendiri maupun mitra kerja, akedemisi dan masyarakat luas.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan, semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak.

*Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...*

Blitar, Januari 2020  
Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar



**PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198903 1 005

## DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI     |  | Halaman |
|----------------|--|---------|
|                |  | i       |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>   |         |
| 1.1.           | Latar Belakang   | I-1     |
| 1.2.           | Landasan Hukum   | I-1     |
| 1.3.           | Maksud dan Tujuan  | I-4     |
| 1.4.           | Sistematika Penulisan  | I-7     |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>  | II-9    |
| 2.1.           | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  | II-9    |
| 2.2.           | Sumber Daya Dinas Perhubungan  | II-12   |
| 2.3.           | Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan  | II-15   |
| 2.4.           | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan   | II-28   |
| <b>BAB III</b> | <b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>  | III-30  |
| 3.1.           | Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan                                   | III-30  |
| 3.2.           | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih                                   | III-33  |
| 3.3.           | Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi Jawa Timur   | III-35  |
| 3.4.           | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  | III-38  |
| 3.5.           | Penentuan Isu-Isu Strategis  | III-39  |
| <b>BAB IV</b>  | <b>TUJUAN , SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>   | IV-41   |
| 4.1.           | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah   | IV-41   |
| 4.2.           | Strategi dan Kebijakan   | IV-45   |
| <b>BAB V</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SERTA PENDANAAN</b> | V-48    |
| <b>BAB VI</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>   | VI-50   |
| <b>BAB VII</b> | <b>PENUTUP</b>   | VII-53  |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang proses pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi maka akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya sopan santun berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kota Blitar ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas



menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan kelancaran lalu lintas, layanan keselamatan jalan dan layanan pengujian kendaraan bermotor.

Di sisi lain, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, tidak terkecuali dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses dan hasil kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Good governance di lingkungan pemerintah kota harus dimulai dengan penataan dan penerapan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat tujuan, Sararan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2016 –2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Kota Blitar dan kelangsungan pembangunan di wilayah Kota Blitar maka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar perlu melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan baik disektor perekonomian dan perdagangan, untuk mendukung Visi tersebut, salah satu faktor yang sangat berperan adalah penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun sehingga kegiatan transportasi dapat memberikan suatu multiplier effect bagi kesinambungan pembangunan di Kota Blitar sedangkan dalam urusan komunikasi dan informatika adanya pelayanan teknologi informasi dan pelayanan publik yang mencakup seluruh SKPD dan masyarakat Kota Blitar.

Guna mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan yang tertuang dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagai implementasi pembangunan di bidang perhubungan, sehingga terwujud Sistem transportasi yang handal, teratur, aman, selamat, lancar dan dapat menghindari seminimal mungkin permasalahan yang muncul.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan dan jasa transportasi Dinas Perhubungan Kota Blitar merumuskan kebijakannya dalam suatu Rencana Strategis 2016 - 2021, sebagai acuan rencana kerja tahunan sehingga penyelenggaraan sistem transportasi tersebut dapat berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat Kota Blitar.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
  22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
  27. Peraturan Daerah Kota Blitar 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030;
  28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar;
  29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021;

30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja dan Rencana Anggaran Dinas;
- b. Penyusunan Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :



- BAB I      Pendahuluan**  
Pada bab ini berisi Latar Belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan serta Sistematika penulisan.
- BAB II      Gambaran Pelayanan SKPD**  
Pada bab ini menguraikan tentang Struktur Organisasi beserta Tugas Pokok dan fungsinya, Sumber Daya Organisasi, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan Dinas.
- BAB III      Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
Pada bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar dan Penentuan Isi-isu strategis.
- BAB IV      Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
Memuat Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah dinas, strategi dan kebijakan.
- BAB V      Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
Pada bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VI      Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
Pada bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.
- BAB VII      Penutup**  
Berisi Kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diinginkan menuju peningkatan pelayanan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
  - c. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
  - d. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
  - f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
  - g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
  - h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  - i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  - j. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP).
  - k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

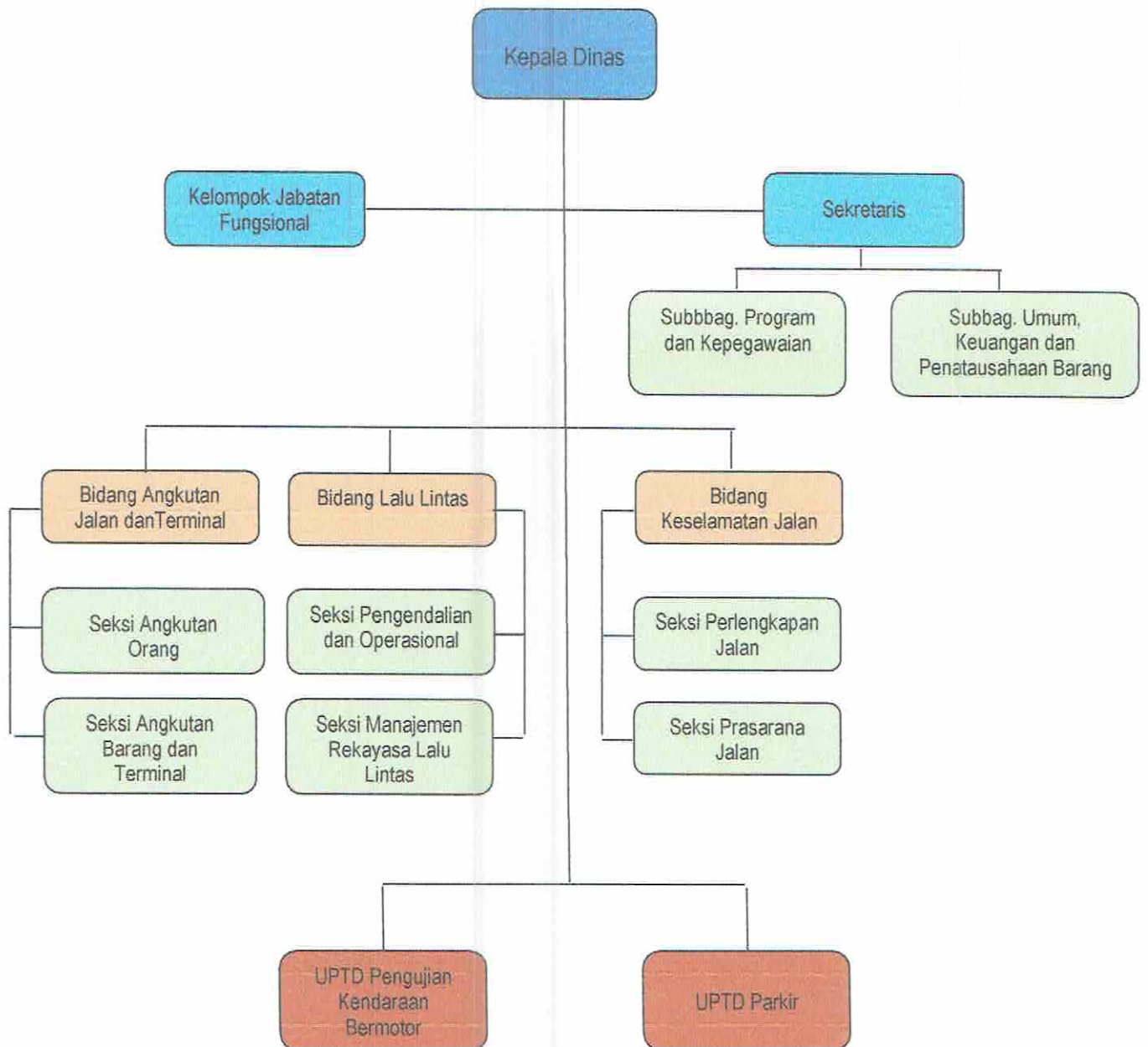
#### **2.1.1. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretaris, membawahi :**
  - a) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- 3. Bidang Lalu Lintas, membawahi :**
  - a) Seksi Pengendalian dan Operasional;
  - b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- 4. Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, membawahi :**
  - a. Seksi Angkutan Orang;
  - b. Seksi Angkutan Barang dan Terminal.
- 5. Bidang Keselamatan Jalan, membawahi:**
  - a) Seksi Perlengkapan Jalan;
  - b) Seksi Prasarana Perhubungan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;**
  - a) UPTD Parkir
  - b) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat digambarkan sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung oleh 52 (lima puluh empat) personil dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Data Pegawai Menurut Golongan

| NO.           | GOLONGAN                    | JUMLAH<br>( ORANG ) |
|---------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.            | Pembina Utama Muda – IV/c   | 1                   |
|               | Pembina Tingkat I – IV / b  | 1                   |
|               | Pembina – IV / a            | 2                   |
|               | <b>Jumlah</b>               | <b>4</b>            |
| 2.            | Penata Tingkat I – III / d  | 7                   |
|               | Penata – III / c            | 6                   |
|               | Penata Muda Tk I – III / b  | 2                   |
|               | Penata Muda – III / a       | 8                   |
|               | <b>Jumlah</b>               | <b>23</b>           |
| 3.            | Pengatur Tingkat I – II / d | 5                   |
|               | Pengatur – II / c           | 11                  |
|               | Pengatur Muda Tk I – II / b | 3                   |
|               | Pengatur Muda – II / a      | 1                   |
|               | <b>Jumlah</b>               | <b>20</b>           |
| 4.            | Juru Tk. I ( I/d )          | 1                   |
|               | Juru ( I/c )                | 0                   |
|               | Juru Muda Tk. I ( I/b )     | 0                   |
|               | Juru Muda - I/a             | 0                   |
|               | <b>Jumlah</b>               | <b>1</b>            |
| 5.            | PTT                         | 4                   |
|               | <b>Jumlah</b>               | <b>4</b>            |
| <b>JUMLAH</b> |                             | <b>52</b>           |

**Tabel 2.2**  
**Data Pegawai Menurut Eselon**

| NO. | TINGKAT ESELON | JUMLAH<br>( ORANG ) |
|-----|----------------|---------------------|
| 1.  | Eselon II      | 1                   |
| 2.  | Eselon III     | 4                   |
| 3.  | Eselon IV      | 11                  |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>16</b>           |

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Menurut Pendidikan**

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH<br>( ORANG ) |
|-----|--------------------|---------------------|
| 1.  | S 2                | 1                   |
| 2.  | S 1                | 14                  |
| 3.  | D 4                | 1                   |
| 4.  | D III              | 5                   |
| 5.  | D II               | 2                   |
| 6.  | SMA                | 28                  |
| 7.  | SMP                | 1                   |
| 8.  | SD                 | -                   |
|     | <b>JUMLAH</b>      | <b>52</b>           |

**Tabel 2.4**  
**Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

| NO. | JENIS KELAMIN | JUMLAH<br>( ORANG ) |
|-----|---------------|---------------------|
| 1.  | LAKI – LAKI   | 44                  |
| 2.  | PEREMPUAN     | 8                   |
|     | <b>JUMLAH</b> | <b>52</b>           |



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional serta kualitas dan kuantitas yang memadai tidak akan bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi apabila tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, hal tersebut merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dinas Perhubungan Kota Blitar telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kerja yang mengarah pada pencapaian sistem kinerja yang baik, adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini dapat diinformasikan sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 :**  
**Data Aset Dinas Perhubungan**

| No. | Jenis                       | Jumlah                | Kondisi                 |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | Terminal Barang             | 12.921 m <sup>2</sup> | Termanfaatkan           |
| 2.  | Terminal Type C             | 4.840 m <sup>2</sup>  | Belum termanfaatkan     |
| 3.  | Printer                     | 33 unit               | 30 layak, 3 rusak       |
| 4.  | Kendaraan Roda 4            | 10 unit               | 8 layak, 2 kurang layak |
| 5.  | Sepeda Motor                | 34 unit               | layak                   |
| 6.  | Alat Uji Kendaraan Bermotor | 14 unit               | layak                   |
| 6.  | Mesin Kompresor             | 2 unit                | layak                   |
| 7.  | Genset                      | 3 unit                | layak                   |
| 8.  | Mesin Potong Rumput         | 4 unit                | 3 layak, 1 rusak        |
| 9.  | Kursi Tunggu                | 8 unit                | layak                   |
| 10. | Filling cabinet             | 25 unit               | 24 layak, 5 rusak       |
| 11. | Brankas                     | 5 unit                | layak                   |
| 12. | Almari                      | 28 unit               | 25 layak, 3 rusak       |
| 13. | Meja Tulis / Kerja          | 43 unit               | 38 layak, 5 rusak       |
| 14. | Kursi Kerja                 | 37 unit               | 32 layak, 5 rusak       |
| 15. | Komputer                    | 38 unit               | Layak                   |
| 16. | Laptop                      | 15 unit               | 10 layak, 5 rusak       |
| 17. | AC                          | 32 unit               | 30 Layak, 2 rusak       |
| 18. | Televisi                    | 18 unit               | layak                   |
| 19. | Kursi Rapat                 | 100 unit              | 85 layak, 15 rusak      |
| 20. | Meja Rapat                  | 35 unit               | 30 layak, 5 rusak       |

|     |                         |         |                  |
|-----|-------------------------|---------|------------------|
| 21. | Mesin Penghancur Kertas | 1 unit  | rusak            |
| 22. | Kipas Angin             | 4 unit  | layak            |
| 23. | Antena HT               | 2 unit  | layak            |
| 24. | Pesawat Ric             | 5 unit  | 3 layak, 2 rusak |
| 25. | Handy Talky             | 41 unit | layak            |
| 26. | LCD                     | 2 unit  | layak            |
| 27. | Kamera                  | 4 unit  | 3 layak, 1 rusak |
| 28. | Pemadam Kebakaran       | 14 unit | Layak            |
| 29. | Gedung Kantor           | 8 unit  | layak            |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

#### 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2010 – 2015

Pengukuran terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar diukur berdasarkan tingkat pencapaian pelayanan dinas dari beberapa sudut pandang penilaian atau standart pelayanan. Adapun standart penilaian yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap target standart pelayanan minimal (SPM) Nasional;
- b. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator kinerja kunci (IKI); dan
- c. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator utama (IKU).

Terdapat beberapa capaian indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi disisi lain juga masih terdapat beberapa capaian yang berada di bawah target. Dari tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai, dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penetapan program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan pencapaian terhadap target-target baik target standart pelayanan minimal, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama SKPD, khususnya bagi pencapaian yang belum mencapai target.

Adapun perhitungan terhadap capaian target urusan perhubungan dimulai tahun 2011 sampai dengan 2015, sedangkan urusan komunikasi dan

informatika dimulai tahun 2014 sampai dengan 2015 dikarekan adanya penggabungan urusan perhubungan dengan urusan komunikasi informatika pada saat perubahan kelembagaan. Berikut disampaikan detail realisasi dan tingkat capaian target pelayanan dari masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini :







| TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKI) URUSAN PERHUBUNGAN |  |   |     |      |      |      |       |       |      |      |      |        |        |   |   |      |
|---|--|---|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------|--------|---|---|------|
| C   | Angkutan Darat   | Jumlah Angkutan Darat/Jumlah Penumpang Angkutan Darat x 100%          | %   | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,07  | 0,06  | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,07   | 0,067  | - | - | -    |
| D   | TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKI) URUSAN KOMINFO        |   |     |      |      |      |       |       |      |      |      |        |        |   |   |      |
|   | Website Milik Pemerintah Daerah                            | Ada/tidak ada   | Ada | -    | -    | -    | Ada   | Ada   | -    | -    | -    | Ada    | Ada    | - | - | Ada  |
| E.  | TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                       |   |     |      |      |      |       |       |      |      |      |        |        |   |   |      |
|   | Peningkatan pelayanan lalu lintas                          | Prosentase Tingkat kelancaran arus lalu lintas                        | %   | -    | -    | -    | 50    | 50    | -    | -    | -    | 47     | 47     | - | - | 1    |
|   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bitar      | %   | -    | -    | -    | 10,29 | 10,29 | -    | -    | -    | 35,29  | 8,82   | - | - | 3,42 |
|   | Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan                   | Prosetase Pemenuhan kebutuhan Angkutan Perkotaan                      | %   | -    | -    | -    | 100   | 100   | -    | -    | -    | 119,37 | 106,91 | - | - | 1,19 |
|   | Terwujudnya keterbukaan informasi public                   | Prosentase tertanganinya permintaan layanan informasi dan dokumentasi | %   | -    | -    | -    | 99    | 100   | -    | -    | -    | 86     | 98,4   | - | - | 0,86 |
|   | Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi       | Prosentase SKPD yang menggunakan TI dalam Pelayanan public            | %   | -    | -    | -    | 100   | 100   | -    | -    | -    | 100    | 100    | - | - | 1    |



### **2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2010 – 2015**

Pengukuran kinerja anggaran dilakukan terhadap tingkat pencapaian/realisasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Dalam perjalanan waktu dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terdapat beberapa program/kegiatan yang pelaksanaannya tidak dilakukan sepanjang waktu 5 (lima) tahun melainkan pada tahun-tahun tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan, sehingga penilaian hanya dilakukan pada saat program/kegiatan pada tahun-tahun tersebut.

Sehubungan dengan review atas Renstra SKPD sebagai akibat dari perubahan kelembagaan, penilaian atas kinerja anggaran urusan Komunikasi dan Informatika dilakukan setelah terjadi penggabungan kelembagaan.

Berikut disampaikan besaran anggaran, realisasi anggaran, tingkat capaian realisasi dan tingkat pertumbuhan atas anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.7 :

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar**

| Uraian   | Anggaran pada tahun ke- |             |             |               |               | Realisasi Anggaran pada tahun ke- |             |             |               |               | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|  | 1                       | 2           | 3           | 4             | 5             | 1                                 | 2           | 3           | 4             | 5             | 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | Anggaran              | Realisasi |
| 1  | 2                       | 3           | 4           | 5             | 6             | 7                                 | 8           | 9           | 10            | 11            | 12  | 13     | 14     | 15     | 16     | 17                    | 18        |
| ADMINISTRASI UMIUM   |                         |             |             |               |               |                                   |             |             |               |               |   |        |        |        |        |                       |           |
| Program pelayanan administrasi perkantoran                                     | 289.919.950             | 453.986.500 | 362.499.600 | 429.059.471   | 594.699.920   | 278.712.378                       | 417.596.929 | 337.959.680 | 396.681.751   | 534.577.919   | 96,13%  | 91,98% | 93,23% | 97,45% | 89,89% | 23,35%                | 20,72%    |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 232.552.655             | 577.119.321 | 461.781.780 | 1.562.286.087 | 1.266.140.301 | 218.131.600                       | 529.382.364 | 411.916.950 | 1.493.425.427 | 1.201.146.850 | 93,80%  | 91,73% | 89,20% | 95,59% | 94,87% | 86,89%                | 90,87%    |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 57.453.500              | 48.240.350  | 78.758.500  | 58.442.550    | 94.485.800    | 57.411.000                        | 46.294.100  | 77.614.000  | 55.298.750    | 92.219.750    | 99,99%  | 95,97% | 98,55% | 94,62% | 97,60% | 20,78%                | 21,58%    |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 8.815.800               | 9.082.500   | 23.149.400  | 41.792.900    | 24.088.900    | 8.599.800                         | 9.012.500   | 22.799.300  | 36.037.900    | 23.150.600    | 97,55%  | 99,23% | 98,49% | 86,23% | 96,10% | 49,02%                | 45,02%    |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | -                       | -           | -           | 72.633.150    | 187.021.600   | -                                 | -           | -           | 72.242.150    | 184.877.500   | -   | -      | -      | 99,46% | 98,85% | 157,49%               | 155,91%   |
| Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                              | -                       | -           | 26.120.000  | 48.649.000    | 44.137.500    | -                                 | -           | 25.960.000  | 48.183.000    | 43.223.500    | -   | -      | 99,39% | 99,04% | 97,93% | 38,49%                | 37,68%    |

| Uraian   | Anggaran pada tahun ke- |                |               |               |               |   | Realisasi Anggaran pada tahun ke- |                |               |               |               |   | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- |        |        |        |        |   | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi |           |
|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---------------------------------|-----------|
|  | 1                       | 2              | 3             | 4             | 5             | 6 | 1                                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6 | 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6 | Anggaran                        | Realisasi |
|  | 1                       | 2              | 3             | 4             | 5             | 6 | 1                                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6 | 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6 | 17                              | 18        |
| URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN  |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | 3.428.284.990           | 3.465.937.532  | 5.023.057.770 | 5.548.987.620 | 9.956.574.127 |   | 3.406.630.700                     | 3.052.041.186  | 4.923.014.520 | 5.499.541.859 | 9.860.795.702 |   | 99,37%  | 88,06% | 98,01% | 99,11% | 99,04% |   |                                 | 33,98%    |
| Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                             | 161.732.095             | 379.327.465    | 640.608.565   | 2.910.826.515 | 1.688.684.830 |   | 155.568.045                       | 347.140.000    | 573.672.350   | 1.881.348.040 | 1.510.828.156 |   | 96,19%  | 91,51% | 89,55% | 64,63% | 89,47% |   | 128,95%                         | 99,16%    |
| Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan               | 2.269.522.645           | 20.000.000.000 | 3.990.000.000 | 5.136.582.000 | 1.948.936.000 |   | 459.582.600                       | 19.487.653.250 | 3.964.945.300 | 5.117.885.700 | 1.906.914.000 |   | 20,25%  | 97,44% | 99,37% | 99,64% | 97,84% |   | 166,97%                         | 1006,74%  |
| Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu-lintas                    | 1.842.707.230           | 1.954.368.135  | 2.370.462.850 | 3.395.318.017 | 2.719.124.533 |   | 1.651.854.720                     | 1.783.278.330  | 2.241.000.400 | 3.329.067.550 | 2.656.438.210 |   | 89,64%  | 91,25% | 94,54% | 98,05% | 97,69% |   | 12,67%                          | 15,49%    |
| Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                             | 332.334.735             |                |               |               |               |   | 330.514.850                       |                |               |               |               |   | 99,45%  |        |        |        |        |   | 0,00%                           | 0,00%     |
| Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan            |                         | 48.461.500     | 13.944.000    | 347.234.550   | 51.999.850    |   |                                   | 47.122.950     | 13.607.000    | 341.448.550   | 49.930.850    |   |   | 97,24% | 97,58% | 98,33% | 96,13% |   | 744,65%                         | 750,95%   |
| URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                           |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi  |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi  |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media                       |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi               |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |
| Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat                |                         |                |               |               |               |   |                                   |                |               |               |               |   |   |        |        |        |        |   |                                 |           |



### 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar Per Unit Sektor Pelayanan Tahun 2010 – 2015

#### Urusan Perhubungan :

1. Uji Kelayakan Sarana Kendaraan Bermotor untuk menjamin Keselamatan Penumpang dan kendaraan pada saat beroperasi di jalan dengan melakukan KIR pengujian kendaraan bermotor untuk penertiban operasional kendaraan yang laik jalan.

Tabel 2.8

Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Uji Kelayakan di Kota Blitar  
Tahun 2011 – 2015

| No | Tahun | Jumlah Kendaraan |
|----|-------|------------------|
| 1. | 2011  | 5.800            |
| 2. | 2012  | 5.857            |
| 3. | 2013  | 6.048            |
| 4. | 2014  | 6.163            |
| 5. | 2015  | 6.303            |

2. Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal dengan melakukan pelayanan publik, pengawasan dan pemeliharaan terminal penumpang dan barang

Tabel 2.9

Jumlah Penumpang yang Dilayani Angkutan Umum di Kota Blitar  
Tahun 2011 – 2015

| No. | Tahun | Jumlah Penumpang |
|-----|-------|------------------|
| 1.  | 2011  | 138.880 Orang    |
| 2.  | 2012  | 156.370 Orang    |
| 3.  | 2013  | 271.500 Orang    |
| 4.  | 2014  | 353.126 Orang    |
| 5.  | 2015  | 399.247 orang    |

Tabel 2.10

Jumlah Kendaraan Bongkar Muat di Dalam dan Luar Pelataran Parkir Mobil  
Barang di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

| No. | Tahun | Jumlah Kendaraan yang Bongkar Muat |                         |
|-----|-------|------------------------------------|-------------------------|
|     |       | Di Dalam Terminal<br>Barang        | Di luar Terminal Barang |
| 1.  | 2011  | 808                                | 668                     |
| 2.  | 2012  | 902                                | 620                     |
| 3.  | 2013  | 998                                | 593                     |
| 4.  | 2014  | 626                                | 1.067                   |
| 5.  | 2015  | 4.574                              | 1.328                   |

3. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas.

Tabel 2.11

Realisasi Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Kota Blitar  
Tahun 2011 – 2015

| No. | Tahun | Jumlah   |
|-----|-------|----------|
| 1.  | 2011  | 147 Unit |
| 2.  | 2012  | 5 Jenis  |
| 3.  | 2013  | 56 Unit  |
| 4.  | 2014  | 16 Unit  |
| 5.  | 2015  | 98 Unit  |

4. Pengadaan Marka Jalan.

Tabel 2.12

Realisasi Kegiatan Pengecatan Marka Jalan di Kota Blitar  
Tahun 2011 - 2015

| No. | Tahun | Volume                  |
|-----|-------|-------------------------|
| 1.  | 2011  | 2.453 m <sup>2</sup>    |
| 2.  | 2012  | 4.136 m <sup>2</sup>    |
| 3.  | 2013  | 11.665 m <sup>2</sup>   |
| 4.  | 2014  | 6.633,3 m <sup>2</sup>  |
| 5.  | 2015  | 15.719,4 m <sup>2</sup> |

5. Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015

Tabel 2.13

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

| No. | Tahun | Hasil Kegiatan  |
|-----|-------|---|
| 1.  | 2011  | Pengadaan peralatan/komponen listrik untuk memelihara jaringan listrik PJU sebanyak 1 paket, pembayaran rekening listrik PJU selama 12 kali   |
| 2.  | 2012  | Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 2226 titik   |
| 3.  | 2013  | pembelian peralatan/komponen listrik untuk memelihara jaringan listrik PJU 24 jenis dan pembayaran rekening PJU selama 12 bulan   |
| 4.  | 2014  | Tersedianya lampu penerangan jalan umum sebanyak 750 titik, dan lampu makam umum dan jogging track sebanyak 34 titik.   |
| 5.  | 2015  | Rehabilitasi Lampu PJU sebanyak 157 Titik, Pengadaan PJU 25 Titik, Pengadaan Penerangan Makam sebanyak 24 Titik dan Pengadaan Lampu PJU Persimpangan sebanyak 7 Titik Persimpangan. |

6. Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Tabel 2.14

Rasio Panjang Jalan Yang Diterangi PJU di Kota Blitar

Tahun 2011 – 2015

| No. | Tahun | Rasio Panjang Jalan Yang diterangi PJU |
|-----|-------|--|
| 1.  | 2011  | 30,00 %                                |
| 2.  | 2012  | 56,65 %                                |
| 3.  | 2013  | 73,00 %                                |
| 4.  | 2014  | 79,00 %                                |
| 5.  | 2015  | 79,68 %                                |



**Urusan Komunikasi dan Informatika :**

Tabel 2.15

Daftar Layanan Website yang Dimiliki Pemerintah Kota Blitar s.d Tahun  
2015

| No. | Instansi                                    | Alamat website   |
|-----|---|--|
| 1.  | Pemerintah Kota Blitar                      | <a href="http://blitarkota.go.id">http://blitarkota.go.id</a>  |
| 2.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | <a href="http://bappeda.blitarkota.go.id">http://bappeda.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://musrenbang.blitarkota.go.id">http://musrenbang.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://gis-tataruang.blitarkota.go.id">http://gis-tataruang.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://monevrkpd.blitarkota.go.id">http://monevrkpd.blitarkota.go.id</a>   |
| 3.  | Badan Kepegawaian Daerah                    | <a href="http://bkd.blitarkota.go.id">http://bkd.blitarkota.go.id</a>  |
| 4.  | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Daerah | <a href="http://sip2dk.blitarkota.go.id">http://sip2dk.blitarkota.go.id</a>  |
| 5.  | Dinas Pendidikan                            | <a href="http://dikda.blitarkota.go.id">http://dikda.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://sman1blitar.sch.id">http://sman1blitar.sch.id</a><br><a href="http://sman2blitar.sch.id">http://sman2blitar.sch.id</a><br><a href="http://sman3blitar.sch.id">http://sman3blitar.sch.id</a><br><a href="http://sman4blitar.sch.id">http://sman4blitar.sch.id</a><br><a href="http://smkn1blitar.sch.id">http://smkn1blitar.sch.id</a><br><a href="http://smkn2blitar.sch.id">http://smkn2blitar.sch.id</a><br><a href="http://smpn1blitar.sch.id">http://smpn1blitar.sch.id</a><br><a href="http://smpn2blitar.sch.id">http://smpn2blitar.sch.id</a><br><a href="http://smpn9blitar.sch.id">http://smpn9blitar.sch.id</a> |
| 6.  | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan   | <a href="http://diperta.blitarkota.go.id">http://diperta.blitarkota.go.id</a>  |
| 7.  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan         | <a href="http://disperindag.blitarkota.go.id">http://disperindag.blitarkota.go.id</a>  |
| 8.  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah    | <a href="http://transparansi.blitarkota.go.id">http://transparansi.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://persediaan.blitarkota.go.id">http://persediaan.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://simbada.blitarkota.go.id">http://simbada.blitarkota.go.id</a>  |
| 9.  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     | <a href="http://dispendukcapil.blitarkota.go.id">http://dispendukcapil.blitarkota.go.id</a>  |
| 10. | Badan Lingkungan Hidup                      | <a href="http://blh.blitarkota.go.id">http://blh.blitarkota.go.id</a>  |
| 11. | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu          | <a href="http://kppt.blitarkota.go.id">http://kppt.blitarkota.go.id</a>  |
| 12. | Kantor Pemilihan Umum Daerah                | <a href="http://kpu.blitarkota.go.id">http://kpu.blitarkota.go.id</a>  |
| 13. | Satuan Polisi Pamong Praja                  | <a href="http://satpolpp.blitarkota.go.id">http://satpolpp.blitarkota.go.id</a>  |
| 14. | Bagian Layanan Pengadaan                    | <a href="http://lpse.blitarkota.go.id">http://lpse.blitarkota.go.id</a>  |
| 15. | Bagian Hukum Setda                          | <a href="http://jdih.blitarkota.go.id">http://jdih.blitarkota.go.id</a>  |
| 16. | Bagian Organisasidan Tata Laksana Setda     | <a href="http://ortala.blitarkota.go.id">http://ortala.blitarkota.go.id</a>  |
| 17. | RSD Mardi Waluyo Kota Blitar                | <a href="http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id">http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id</a>  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 18. | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika     | <a href="http://dishubkominfo.blitarkota.go.id">http://dishubkominfo.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://mail.blitarkota.go.id">http://mail.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://ulpim.blitarkota.go.id">http://ulpim.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://ppid.blitarkota.go.id">http://ppid.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://dokumentasi.blitarkota.go.id">http://dokumentasi.blitarkota.go.id</a><br><a href="http://mahardhikafm.com">http://mahardhikafm.com</a> |
| 19. | Inspektorat                                       | <a href="http://inspektorat.blitarkota.go.id">http://inspektorat.blitarkota.go.id</a>  |
| 20. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan                | <a href="http://gis-imb.blitarkota.go.id">http://gis-imb.blitarkota.go.id</a>  |
| 21. | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | <a href="http://pipp.blitarkota.go.id">http://pipp.blitarkota.go.id</a>  |

Tabel 2.16

Data Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pembangunan yang Disampaikan Melalui ULPIM Kota Blitar Tahun 2012 - 2015

| No.    | Topik        | Jumlah     |            |            |            |
|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|        |              | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| 1      | Pertanyaan   | 117        | 141        | 288        | 62         |
| 2      | Keluhan      | 61         | 41         | 36         | 23         |
| 3      | Usul / Saran | 24         | 30         | 33         | 15         |
| 4      | Informasi    | 6          | 11         | 11         | 8          |
| 5      | Kritik       | 10         | 9          | 0          | 6          |
| Jumlah |              | 218        | 232        | 368        | 114        |

Tabel 2.17

Data Penyelenggara Layanan Penyiaran Radio di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015

| No. | Jenis Penyelenggara Penyiaran Radio | Status Perijinan  |   |
|-----|-------------------------------------|---|---|
|     |                                     | Berijin/Sedang Proses Ijin  | Belum Berijin   |
| 1.  | LPPL                                | • LPPL Mahardhika FM  | -   |
| 2.  | LPS                                 | • Radio Mayangkara FM<br>• Radio Patria FM  | -   |
| 3.  | Radio Komunitas                     | • Radio Indo Global Mandiri<br>• Radio Yudhantara FM<br>• Radio KONI FM<br>• Radio Harmoni FM | • Radio PP Bustanul Muta'alimin<br>• Radio Sarinah<br>• Radio Panglima FM<br>• Radio J2 FM<br>• Radio Pesona FM |
| 4.  | Radio Amatir                        | • RAPI<br>• ORARI   |   |

Tabel 2.18

Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015

| No.    | Pengguna   | Status Perijinan    |       |
|--------|------------|---------------------|-------|
|        |            | Sudah/Sedang Proses | Belum |
| 1.     | Telkomsel  | 11                  | 2     |
| 2      | Indosat    | 9                   | -     |
| 3      | Smartfren  | 1                   | -     |
| 4      | XL         | 1                   | -     |
| 5      | Axis       | 1                   | -     |
| 6      | HCPT/Three | 4                   | -     |
| Jumlah |            | 27                  | 2     |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

### 2.4.1 Urusan Perhubungan

#### a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Belum terpenuhinya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum secara lengkap dan merata pada ruas-ruas jalan di Kota.
2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian angkutan barang
3. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.

#### b. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi.
2. Tersedianya Dokumen Tatanan Transportasi Lokal.
3. Adanya penambahan armada bus sekolah gratis yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan guna meningkatkan pelayanan transportasi gratis bagi siswa di Kota Blitar yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Blitar.



## **2.4.2 Urusan Komunikasi dan Informatika**

### **a. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Infrastruktur telekomunikasi yang tersedia di Kota Blitar (termasuk Hotspot Pro Rakyat) belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi secara maksimal sehingga masih perlu dilakukan peningkatan secara baik dalam segi pemerataan dan perluasan jangkauan.
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.

### **b. Peluang**

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Adanya rencana pemetaan Zonasi Cell Plan di wilayah Kota Blitar.
2. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat yang berkontribusi kepada pencapaian diseminasi informasi.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau OPD itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi yang dimasa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

Berikut adalah tabel identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Tabel 3.1

Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Urusan Perhubungan

| NO | TUGAS POKOK DAN FUNGSI   | PERMASALAHAN   |
|----|--|--|
| 1. | Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan | <p>Sarana Prasarana Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang belum merata;</li><li>- Pemeliharaan atau perbaikan fasilitas kelengkapan jalan yang rusak belum optimal;</li><li>- Perkembangan teknologi dibidang kelengkapan jalan yang selalu dinamis;</li></ul> <p>Menejemen Lalu Lintas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan pengembangan ruas jalan;</li><li>- Masih banyak pengguna jalan yang kurang disiplin terhadap aturan berlalu lintas.</li></ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Angkutan Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penumpang bus sekolah maupun angkutan kota yang diperbantukan untuk mengangkut pelajar rata-rata melebihi kapasitas baik saat berangkat maupun pulang sekolah;</li> <li>- Jumlah tempat tunggu atau halte belum memadai;</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran penumpang umum maupun pelajar untuk memanfaatkan halte-halte yang tersedia;</li> <li>- Sepinya peminat jasa angkutan kota menyebabkan kurang adanya kepastian armada angkutan kota yang beroperasi;</li> <li>- Dengan adanya potensi wisata di kota Blitar, tidak di ikuti dengan ketersediaan angkutan pariwisata untuk mengangkut penumpang ke tempat-tempat wisata di kota Blitar;</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan barang untuk bongkar muat di dalam terminal barang.</li> </ul> |
|--|--|--|

Dari tabel identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dibidang Perhubungan :

1. Dalam Penyusunan program perencanaan dibidang perhubungan harus selalu memperhatikan aspek pemerataan masyarakat;
2. Dalam pembangunan infrastruktur perhubungan harus selalu mengacu pada hasil perencanaan di bidang perhubungan;



Tabel 3.2

Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dalam Urusan Perhubungan

| NO | ISU STRATEGIS  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  | PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR   | DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR   |
| 1. | Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal  | Belum optimalnya prasana dan sarana untuk mendukung peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sektor transportasi                 | Belum terpasang secara menyeluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan.                                       |
| 2. | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah  | Terbatasnya aksesibilitas ke wilayah kepulauan dan wilayah terpencil  | Belum meratanya jalur angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar                               |
| 3. | Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi | Upaya untuk mendorong peran serta semua pihak dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi telah dilakukan dengan berbagai upaya. | Kecilnya minat masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan sulit berkembangnya usaha di bidang transportasi |
| 4. | Peningkatan Kualitas SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi   | Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan kebutuhan dan Permasalahan "the right man on the right job"                            | Keterbatasan SDM yang Kompeten di bidang transportasi.  |
| 5. | Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim   | Terbatasnya kapasitas untuk pengembangan teknologi  | Perkembangan teknologi belum diikuti secara menyeluruh pada Pengujian Kendaraan Bermotor.                     |

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan program di Dinas Perhubungan Kota Blitar, hal tersebut adalah:

1. Dalam penyusunan rencana program perhubungan harus bisa mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Blitar untuk menunjang kelancaran semua aspek kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan Infrastruktur perhubungan harus tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas;
3. Perkembangan teknologi dibidang sarana dan prasaran perhubungan harus selalu diikuti guna meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan untuk masyarakat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.**

Dalam penyusunan rencana program kegiatan, Dinas Perhubungan Kota Blitar tidak lepas dari Visi Misi Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam arti penentuan program dan kegiatan untuk mencapai visi misi kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah :

**" Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021"**

Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
4. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.
6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.



3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terkait Urusan Perhubungan.

Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai keterkaitan dengan misi ke tiga yaitu “Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bardaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 maka keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar serta keterkaitannya dengan misi di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai tanggung jawab meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Perhubungan dan Pariwisata yang dapat mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaan program ini tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong suksesnya pelaksanaan program tersebut, berikut tabel uraian faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut :

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| No  | Misi   | Permasalahan   | Faktor   |  |
|   |  |  | Penghambat   | Pendorong  |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.  | Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bardaya Saing dan Berwawasan Lingkungan | Pengembangan Infrastruktur dibidang perhubungan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat | Perkembangan Teknologi di bidang perhubungan yang selalu dinamis | Renstra kementrian perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. |



### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur.

Telaahan ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur maupun dengan Renstra Kementerian Perhubungan.

Adapun Renstra Kementerian Perhubungan memuat Visi dan Misi Sebagai Berikut :

VISI : “ Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

MISI :

1. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan transportasi dalam upaya peningkatan jasa transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pembangunan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Transportasi
4. Melanjutkan Proses restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi
5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang sumber daya manusia (SDM) dan Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten
6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Untuk mencapai visinya, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab membuat Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan nasional yang mana dengan sistem ini akan ada sinkronisasi dan sinergitas pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan antara pusat dengan daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi dan kajian kebijakan. Dari hasil Pemantauan, evaluasi dan kajian kebijakan ini nantinya digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan

dan akan menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan.

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik dan lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah yang berkaitan dengan urusan perhubungan.

Selain menelaah Renstra Kementerian perhubungan, sebagai acuan penyusunan Renstra, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga menelaah Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Visi Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, maka dalam Menyusun Renstra, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan mempunyai tujuan “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk mengembangkan Daya Saing ekonomi dan Kesejahteraan”

Untuk menunjang tujuan tersebut diatas, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur telah menentukan sasaran Program kegiatan, yaitu “ Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan serta Mewujudkan Keselamatan, Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Angkutan Darat, Laut dan Udara”.

Dengan mengacu pada hasil telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menyusun renstra mengedepankan program pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas selama lima tahun ke depan.

Tabel. 3.4

Permasalahan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kota Blitar mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan

| NO | RENCANA STRATEGIS  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  | PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR   | DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR   |
| 1. | Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal  | Belum optimalnya prasana dan sarana untuk mendukung peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sektor transportasi                 | Belum terpasang secara menyeluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan.                                       |
| 2. | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah  | Terbatasnya aksesibilitas ke wilayah kepulauan dan wilayah terpencil  | Belum meratanya jalur angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar                               |
| 3. | Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi | Upaya untuk mendorong peran serta semua pihak dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi telah dilakukan dengan berbagai upaya. | Kecilnya minat masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan sulit berkembangnya usaha di bidang transportasi |
| 4. | Peningkatan Kualitas SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi   | Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan kebutuhan dan Permasalahan "the right man on the right job"                            | Keterbatasan SDM yang Kompeten di bidang transportasi.  |
| 5. | Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim   | Terbatasnya kapasitas untuk pengembangan teknologi  | Perkembangan teknologi belum diikuti secara menyeluruh pada Pengujian Kendaraan Bermotor.                     |



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dalam Urusan Perhubungan

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dan bila ditinjau dari Rencana tata ruang wilayah, dinas Perhubungan Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada beberapa faktor penghambat maupun pendorong dalam melaksanakan tanggung jawabnya, adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel. 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis   | Permasalahan   | Faktor   |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  | Penghambat   | Pendorong   |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
| 1. | Pengembangan, Penigkatan dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan | Partisipasi Masyarakat terhadap perkembangan transportasi kurang maksimal      | Kurang optimalnya informasi tentang transportasi kepada masyarakat | Tatanan Transportasi Lokal                                      |
| 2. | Standarisasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor               | Banyaknya kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar emisi gas buang       | Uji emisi hanya berlaku untuk kendaraan umum                       | Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor               |
| 3. | Penurunan Konsumsi Daya Listrik                                    | Besarnya konsumsi daya listrik yang digunakan pada fasilitas perlengkapan jala | Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan secara konvensional        | Traffic Light, Warning Light dan PJU yang mengguakan Solar Cell |

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### 3.5.1 Penentuan Isu-isu Strategis urusan Perhubungan

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2016-2021 dalam bidang perhubungan antara lain :

1. Belum Meratanya Pemasangan Perlengkapan Jalan.

Pemasangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kota Blitar sampai dengan saat ini belum mencapai 100%, dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu lintas, kami selaku dinas teknis yang menangani sarana dan prasarana perlengkapan jalan memandang perlu adanya program pemerataan perlengkapan jalan yang mana manfaatnya akan dapat langsung bersentuhan dengan pengguna jalan di Kota Blitar.

2. Berkurangnya Minat Masyarakat Terhadap Angkutan Umum.

Kurang optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum serta minimnya armada angkutan umum membuat masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan umum. Dampak dari permasalahan ini adalah meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya. Bila hal ini kita biarkan, maka dengan semakin bertambahnya kendaraan pribadi di jalan raya maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemacetan lalu lintas pada ruas jalan di Kota Blitar.

3. Belum Terhubungnya Antar Moda.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut gerak masyarakat di bidang ekonomi semakin lincah, untuk mengantisipasi pertumbuhan ini perlu adanya interkoneksi antar moda di Kota Blitar yang dapat mendukung pergerakan masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Saat ini di Kota Blitar belum ada trayek angkutan umum yang menghubungkan moda satu dengan moda lainnya, hal ini bisa menjadi penghambat masyarakat untuk melakukan pergantian moda transportasi dalam menunjang aktifitas sehari-hari.

4. Belum Optimalnya Kinerja Ruas Jalan.

Pertumbuhan dan penambahan kendaraan di Kota Blitar semakin pesat, sementara kapasitas jalan di kota blitar bisa dibilang tetap atau tidak mengalami perubahan. Dengan tidak sebandingnya perkembangan antara

pertumbuhan kendaraan dengan perkembangan kapasitas ruas jalan, maka hal ini akan mengurangi nilai dari kinerja ruas jalan yang ada di Kota Blitar.



## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Penentuan tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Karena RPJMD tersebut merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Kota Blitar yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga untuk kelanjutan dari RPJP memerlukan RPJMD yang penyusunannya melibatkan pihak-pihak terkait. Dimana dalam RPJMD tersebut disebutkan misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kota Blitar untuk enam tahun yang akan datang mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Misi, tujuan serta sasaran tersebut dituangkan pada tujuan serta sasaran jangka menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dengan berpedoman pada poin-poin tersebut, maka kesinambungan program kegiatan pada SKPD dapat berjalan dan tercapai sesuai dengan perencanaan.

Adapun untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Urusan Perhubungan disampaikan pada tabel 4.1, sebagai berikut

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

| No | Tujuan                                  | Indikator Tujuan  | Rumus Perhitungan  | Target akhir th 2021 | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Rumus Perhitungan  | Target     |               |            |            |            |
|----|---|---|--|----------------------|--|--|--|------------|---------------|------------|------------|------------|
|    |   |   |  |                      |  |  |  | 2017       | 2018          | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1. | Meningkatkan kinerja pelayanan Transpor | Presentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik | (Jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam keadaan baik dibagi jumlah seluruh prasarana dan fasilitas perhubungan ) dikali 100% | 5<br>93 %            | 6<br>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan                    | 7<br>Presentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan | 8<br>(Ruas Jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan dibagi Jumlah Ruas Jalan) x 100% | 10<br>80 % | 11<br>83,75 % | 12<br>90 % | 13<br>93 % | 14<br>95 % |
|    |   |   |  |                      | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Sekolah dan Terminal Cargo/Barang | Load Factor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis                                    | (Jumlah Penumpang Angkutan Sekolah Gratis dibagi Kapasitas Kendaraan Sekolah Gratis) x 100%        | 71%        | 72%           | 73%        | 74%        | 75%        |
|    |   |   |  |                      | Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar          | Pemanfaatan Terminal Cargo/Barang  | (Luas Terminal Cargo/Barang yang dimanfaatkan dibagi Luas Total Terminal Cargo/Barang) x 100%      | 32%        | 34%           | 36%        | 38%        | 40%        |
|    |   |   |  |                      |  | Peraihah Wahana Tata Nugraha   | WTN  | WTN        | WTN           | WTN        | WTN        | WTN        |

## 4.2 STRATEGI dan KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dishub Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dishub Kota Blitar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dishub Kota Blitar menunjukkan bagaimana cara Dishub Kota Blitar mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dishub Kota Blitar dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dishub Kota Blitar.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dishub Kota Blitar selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dishub Kota Blitar bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dishub Kota Blitar.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dishub Kota Blitar mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dishub Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana tabel 4.2 berikut ini :



Tabel. 4.2  
Matrik SWOT Urusan Perhubungan

| <p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>   | <p style="text-align: center;">Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Penda Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan yang jelas mengenai Tugas, pokok dan Fungsi masing masing Bidang</li> <li>- Tersedianya SDM, Sarana, Prasarana dan Pendanaan di Bidang Perhubungan.</li> <li>- Adanya Peraturan Pelaksanaan Pendukung di Bidang Perhubungan.</li> </ul> | <p style="text-align: center;">Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya tenaga teknis di bidang Perhubungan.</li> <li>- Belum Optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi antar bidang.</li> <li>- Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi masing - Masing Bidang.</li> </ul>   |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Renstra Kemenhub dan Renstra Dishub &amp; LLAJ Propinsi Jatim</li> <li>- Adanya Dokumen RPJMD</li> <li>- Dinamika Perkembangan Teknologi terbaru di bidang Perhubungan</li> <li>- Adanya Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan</li> <li>- Adanya Tuntutan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Perhubungan</li> </ul> | <p style="text-align: center;">STRATEGI S+O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempedomani Renstra Kemenhub dan RPJMD sebagai bahan acuan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam peningkatan pelayanan perhubungan</li> <li>- Mempedomani Peraturan Pelaksanaan Pendukung di Bidang Perhubungan</li> </ul>   | <p style="text-align: center;">STRATEGI W+O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan SDM Pengetahuan Teknologi terbaru di bidang Perhubungan.</li> <li>- Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Perhubungan</li> <li>- Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan Jasa Perhubungan.</li> </ul>  |
| <p style="text-align: center;">Tantangan (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum meratanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan.</li> <li>- Belum Optimalnya Penggunaan Angkutan Umum bagi Masyarakat</li> <li>- Belum terintegrasinya hubungan antar moda angkutan</li> <li>- Belum maksimalnya kinerja beberapa ruas jalan</li> </ul>   | <p style="text-align: center;">STRATEGI S+T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi kebutuhan fasilitas, sarana dan Prasarana Perhubungan</li> <li>- Meningkatkan Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas hubungan antar moda angkutan</li> <li>- Meningkatkan Koordinasi Peningkatan Pelayanan angkutan umum</li> </ul>  | <p style="text-align: center;">STRATEGI W+T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pemerataan Kebutuhan Fasilitas, sarana dan Prasarana Perhubungan</li> <li>- Meningkatkan kinerja Pelayanan Angkutan Umum</li> <li>- Meningkatkan Keterpaduan antar moda transportasi.</li> <li>- Meningkatkan kinerja Lalu Lintas Jalan</li> </ul> |

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan urusan Perhubungan Dishub Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (tabel 4.3):

Tabel 4.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Urusan Perhubungan Dishub Kota Blitar

| TUJUAN                                      | SASARAN  | STRATEGI  | KEBIJAKAN   |
|---|--|---|---|
| Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan                         | Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan                               | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan  |
|   | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Sekolah dan Terminal Cargo/Barang | Peningkatan kinerja pelayanan angkutan Sekolah Gratis dan Pemanfaatan Terminal Cargo/Barang | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan angkutan Sekolah dan terminal Cargo/Barang yang memadai |
|   | Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar          | Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan   | Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  |

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar, pada rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi pedoman terukur pada kurun 5 tahun ke depan, yang mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kinerja pelayanan transportasi.

Dari tujuan tersebut lebih lanjut diuraikan ke dalam tiga sasaran sebagai berikut :

- A. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan**
- B. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Sekolah dan Terminal Cargo/Barang**
- C. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Yang Tertib, Aman Dan Lancar**

Dari tiga sasaran tersebut dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yaitu:

#### **1. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan**

- I. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
  - 1) Kegiatan Peningkatan Perlengkapan Jalan
  - 2) Kegiatan Peningkatan Prasarana Perhubungan
- II. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
  - 1) Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

#### **2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Sekolah dan Terminal Cargo/Barang**

- I. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Angkutan Orang/sekolah
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Angkutan Barang dan Terminal

#### **3. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Yang Tertib, Aman Dan Lancar**

- I. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
  - 1) Kegiatan manajemen Rekayasa Lalu Lintas



- 2) Kegiatan Pengendalian dan Operasional
- II. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN
  - 1) Kegiatan Pembinaan Juru Parkir

Untuk urusan administrasi umum pada Dinas Perhubungan Kota Blitar terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut :

- a) PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN.
  - 1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
  - 2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
  - 3. Kegiatan Pengusutan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan sarana Prasarana Perkantoran
  - 4. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
  - 5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- b) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
  - 1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian
  - 2. Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah
- c) PROGRAM PENINGKATAN PENFEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
  - 1. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Dari program dan kegiatan pada rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar ditetapkan pendanaan indikatif selama lima tahun yang digunakan sebagai acuan pendanaan setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja dan pendanaan indikatif ditampilkan dalam Tabel 5.1, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 sebagai berikut :

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan/ atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya indikator kinerja yang jelas. Dimana indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021, Dinas Perhubungan merumuskan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai pedoman selama 5 tahun ke depan. Adapun indikator kinerja SKPD tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel 6.1, tabel 6.2 dan tabel 6.3 sebagai berikut:

TABEL 6.1

## INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| No | INDIKATOR SASARAN RPJMD                     | INDIKATOR TUJUAN RENSTRA  | KONDISI KINERJA PADA AWAL |         | TARGET<br>2017 |
|----|---|---|---------------------------|---------|----------------|
|    |   |   | 2015                      | 2016    |                |
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Transportasi | Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik | 75 %                      | 77.75 % | 80,5 %         |

TABEL 6.2

## INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

| NO | INDIKATOR SASARAN RPJMD                     | INDIKATOR TUJUAN RENSTRA  | KONDISI KINERJA<br>PADA AWAL<br>PERIODE RPJMD | TARGET  |      |         | KONDISI<br>KINERJA PAA<br>AKHIR TAHUN |
|----|---|---|---|---------|------|---------|---------------------------------------|
|    |   |   |   | 2016    | 2018 | 2019    |                                       |
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Transportasi | Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik | 77.75 %                                       | 83.75 % | 87 % | 89.75 % | 93 %                                  |



TABEL 6.3

## INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TH. 2017-2021

| NO | KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | FORMULASI PERHITUNGAN  | TARGET     |            |            |            |            | TARGET PADA AKHIR RPJMD |
|----|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
|    |  |   |  | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |                         |
| 1  | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan                         | Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan | Ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan dibagi Jumlah Ruas Jalan x 100 % | 80%        | 83.75%     | 90%        | 93%        | 95%        | 95%                     |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Sekolah dan Terminal Cargo/Barang | Load Factor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis                               | Jumlah Penumpang Angkutan Sekolah Gratis dibagi Kapasitas Kendaraan Sekolah Gratis x 100%    | 71%        | 72%        | 73%        | 74%        | 75%        | 75%                     |
|    |  | Pemanfaatan Terminal Cargo/Barang   | Luas Terminal Cargo/Barang yang dimanfaatkan dibagi Luas Total Terminal Cargo/Barang x 100%  | 32%        | 34%        | 36%        | 38%        | 40%        | 40%                     |
| 3  | Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar          | Peraihan Wahana Tata Nugraha  | WTN  | WTN        | WTN        | WTN        | WTN        | WTN        | WTN                     |

## BAB VII

### PENUTUP

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2016-2021,
2. Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2016 sampai dengan 2021 bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar.
3. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2016 – 2021.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Renstra dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BLITAR  
**PRYO SUHARTONO, S.sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198903 1 005

Tabel 6.1.1  
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, MELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BILITAR TAHUN 2016

| Tujuan   | Indikator Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Kode | Program dan kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 |   | Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016                         |                  | Unit Kerja SIPD Penanggungjawab | Lokasi      |               |                  |               |
|--|--|--|---|------|--|---|--|--|---|---|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|  |  |  |   |      |  |   |  | Target   | Rp.   | Target  | Rp.              |                                 |             |               |                  |               |
| 1. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi | 2. Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan | Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan | 5    | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | 7   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12               | Bidang Keselamatan Jalan        | Kota Biltar |               |                  |               |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 15   | 75%   | 77,75%  | 7.492.978,750    |                                 |             | 7.373.258,731 |                  |               |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 15   | 1   | Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor *          | 87%              |                                 |             | 409.677,050   | 88%              | 408.801,575   |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 15   | 15  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan *                                | 3 unit           |                                 |             | 215.799,500   | 3 unit           | 213.823,900   |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 15   | 5   | Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu-lintas                                  | 75%              |                                 |             | 447.947,830   | 78%              | 444.814,800   |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 15   | 6   | Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan listrik                                   | 75%              |                                 |             | 6.419.654,400 | 80%              | 6.306.819,456 |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN          | 45%   | 3.615.503,480    |                                 |             | 47%           | 3.347.714,223    |               |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | 1   | Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya *             | 15kali           |                                 |             | 150.572,340   | 24 kali          | 111.785,340   |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | 2   | Sosialisasi/Perwujudan Keterbacaan Lalu Lintas dan Angkutan *                 | 13.64%           |                                 |             | 299.057,390   |                  | 186.238,100   |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | 4   | Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan                               | 0                |                                 |             | 62.046,950    | 6 kali           | 51.565,097    |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | 5   | Fasilitasi Operasional Terminal   | 12               |                                 |             | 161.266,400   | 12               | 145.887,143   |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | 6   | Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah                                       | 4 Bus, 14 Angkot |                                 |             | 2.947.240,400 | 4 bus, 14 Angkot | 2.823.582,788 |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 16   | 7   | Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang * | 6                |                                 |             | 35.320,000    | 5                | 28.855,200    |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 18   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | 8.82  | 3.016.756,226    |                                 |             | 5,01%         | 2.998.001,198    |               |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 18   | 1   | Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas   | 1930             |                                 |             | 433.007,100   | 102 rambu        | 4.31.446,100  |
|  |  |  |   | 1    |  |   | 7 1.07.01                                | 18   | 2   | Pengadaan Marka Jalan   | 70%              |                                 |             | 762.626,700   | 81%              | 754.028,700   |



| Tujuan   | Indikator Tujuan | Sasaran     | Indikator Sasaran | Mode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan |               | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan |             | Unit Kerja SKPD Pemasangan | Lokasi |
|----------|------------------|-------------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|---------------|--|-------------|----------------------------|--------|
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | Target  | Rp.           | Target   | Rp.         |                            |        |
| 1        | 2                | 3           | 4                 | 5    | 6                    | 7  | 8  | 9   | 10            | 11   | 12          | Bidang Lalu Lintas         | 13     |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 100%  | 760,181,920   | 100%   | 759,185,350 |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 100%  | 892,599,206   | 100%   | 887,377,748 |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 10%   | 168,041,300   | 19%  | 165,963,300 |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 100%  | 0             | 0  | 0           |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 75%   | 1,164,877,450 | 1,070,170,688                                    |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 10 KIM  | 40,645,600    | 34,883,200                                       |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 40  |               |  |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 1 buah  | 500,396,400   | 457,470,154                                      |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 12 bulan                                      | 306,802,100   | 274,007,077                                      |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 0   | 123,756,500   | 122,574,500                                      |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 35 buah                                       |               | 33 buah  |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 0   |               |  |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 0   |               |  |             |                            |        |
|          |                  |             |                   |      |                      |  |  | 0   |               |  |             |                            |        |
| 98,45%   | 82,446,350       | 71,971,118  | 1                 |      |                      |  |  |   |               |  |             |                            |        |
| 0        |                  |             |                   |      |                      |  |  |   |               |  |             |                            |        |
| 12 bulan | 110,830,500      | 109,264,699 | 12 bulan          |      |                      |  |  |   |               |  |             |                            |        |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Revisi/realisasi | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           | Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |  | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab                                 | Lokasi  |   |             |   |             |                       |            |    |    |
|--------|------------------|---------|-------------------|------|----------------------|---|--|---|-----------|--|--|---|---|---|-------------|---|-------------|-----------------------|------------|----|----|
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | Target  | Rp.       | Target   | Rp.  |   |   |   |             |   |             |                       |            |    |    |
| 1      | 2                | 3       | 4                 | 5    | 6                    | 7   | 8  | 1   | 7.2.09.01 | 16   | PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI   | 13%   | 19%   | 9   | 51,199,200  | 10  | 0           | 11                    | 48,561,400 | 12 | 13 |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 16   | 1  | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi       | 2 buah  | 1 buah  | 51,199,200  | 1 buah  | 48,561,400  |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 17   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS KOMINFO        | 10  | 4 buah  | 278,933,485                                   | 4 buah      | 272,175,648                                   |             |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 17   | 1  | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi                            | 10  | 4 buah  | 278,933,485 | 4 buah  | 272,175,648 |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 18   | PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 20%   | 30%   | 32,405,500                                    | 0           | 6,420,500                                     |             |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 18   | 2  | Fasilitasi pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi        | 0   | 0   | 12,405,500  |   | 6,420,500   |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 16   | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN IMAS MEDIA *                    | 12 kali   | 12 kali                                       | 529,209,550                                   | 12 kali     | 509,132,325                                   |             |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 16   | 1  | Penyediaan informasi pembangunan daerah**                       | 3000 exp/900artikel/60 media cetak/30 website | 3000 exp/900artikel/60 media cetak/30 website | 434,052,700 | 3000 exp/900artikel/60 media cetak/30 website | 426,845,475 |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | 1   | 7.2.09.01 | 16   | 2  | Penyediaan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat** | 12 kali                                       | 12 kali                                       | 95,146,850  | 11 kali                                       | 82,286,850  |                       |            |    |    |
|        |                  |         |                   |      |                      |   |  | <b>TOTAL</b>                                  |           |  |  |   |   |   |             | <b>16,154,674,641</b>                         |             | <b>15,625,434,713</b> |            |    |    |


  
 Bilhar, Januari 2020  
 Kepala Dinas Perhubungan Kota Bilhar  
 HARTONO, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19671224 198903 1 005











|              |    |   |   |  |   |   |          |               |      |                |
|--------------|----|---|---|--|---|---|----------|---------------|------|----------------|
| 07           | 06 | 5 | 2 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan pengamanaan lalu lintas                 | Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian dan pengamanaan lalu lintas | 0 | 2 kali   | 86,205,000    | 2.   | 59,021,180     |
| 07           | 01 | 5 | 2 | Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Pengendalian dan Pengamanaan Lalu Lintas | Jumlah norma kajian atau Kebijakan, Lalu Lintas   |   | 2 Kajian | 85,751,500    | 1    | 80,617,500     |
| 07           | 04 | 5 | 2 | Facilitasi Pengamanaan lalu lintas.  | Jumlah jenis pengamanaan lalu lintas  |   | 8 jenis  | 955,635,440   | 8.   | 926,333,700    |
| 09           | 00 | 5 | 2 | PROGRAM/PENINGKATAN PELAYANAN PERPAKIRAN   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran                                   |   | cukup    | 1,349,688,600 | baik | 1,298,566,350  |
| 09           | 01 | 5 | 2 | Facilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir   | Jumlah Juru parkir yang terfasilitasi   |   | 250      | 1,308,469,900 | 250  | 1,279,926,150  |
| 09           | 02 | 5 | 2 | Pembinaan dan Sosialisasi Perparkiran  | Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi perparkiran  | 0 | 3        | 41,227,700    | 3    | 18,640,200     |
| <b>TOTAL</b> |    |   |   |  |   |   |          |               |      | 16,243,186,822 |

Blitar, Januari 2020  
Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar



PRINCE SAMUDIONO, S.Sos, MSI  
Kabid. Utama Muda  
NIP. 20913224 198903 1 005



Tabel 6.1.4  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2019-2021

| Tujuan  | Indikator Tujuan   | Sasaran   | Indikator Sasaran   | Kode        | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |   | Target Kinerja Progam dan Kegiatan Pendanaan  |                           |                           |                           |                           |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021) | PD Penanggungjawab | Lokasi        |
|---|--|---|---|-------------|---|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------|---------------|
|   |  |   |   |             |   |   | Target                                   | Rp.   | Tahun 2019                                    |                           | Tahun 2020                |                           | Tahun 2021                |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Target  | Rp.                       | Target                    | Rp.                       | Target                    | Rp.            |   |                    |               |
| 1<br>Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi dalam kondisi baik | 2<br>Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik | 3<br>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan | 4<br>Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan | 5           | 6<br>Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan | 7<br>Persentase Kelengkapan Jalan dalam Kondisi Baik      | 8  | 11  | 12  | 13                        | 14                        | 15                        | 16                        | 17             | Bidang Keselamatan Jalan                          | Kota Blitar        |               |
|   |  |   |   |             |   |   | 75                                       | 87  | 9,132,048,715                                 | 90                        | 16,627,370,868            | 12,550,000,000            | 93                        | 12,550,000,000 |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   | 05 01 5 2                                | Peningkatan Perilengkapan Jalan                               | Jumlah Rambu yang tersedia                    | 20 rambu                  | 1,530,221,800             | 50 rambu                  | 1,494,640,000             | 75 rambu       |   |                    | 1,550,000,000 |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Jumlah rambu yang terpelihara                 | 2615 rambu                |                           | 2685 rambu                |                           | 2700 rambu     |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Jumlah CCTV yang terpelihara                  | 21 unit                   |                           | 22 unit                   |                           | 23 unit        |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Panjang Marka jalan yang terpelihara          | 4900 m                    |                           | 5000 m                    |                           | 5000 m         |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   | 05 02 5 2                                | Peningkatan Prasarana Perhubungan                             | Jumlah cermin tngkungan yang tersedia         |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Panjang guardrail yang terpasang              | 44 meter                  |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Jumlah Warning light yang tersedia            | 3 titik                   |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   | Jumlah PJU yang tersedia                      | 0 titik                   | 7,601,826,915             | 130 titik                 | 15,132,730,868            | 11,000,000,000 |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   | 08 00 5 2                                | Program Peningkatan Kelajian Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan | 94                        | 894,957,300               | 95                        | 877,658,300               | 96             |   |                    | 1,105,000,000 |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   |   | 6500 kendaraan (12 bulan) | 6000 kendaraan (12 bulan) | 5500 kendaraan (12 bulan) | 5500 kendaraan (12 bulan) |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   |   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   |   | 74.24 meter               | 0                         | 0                         | 0                         |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   |   | 5 unit                    | 0                         | 0                         | 0                         |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   |   |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  |   |   |             |   |   |  |   |   |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
| 08 01 5 2   | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor                                 | Jumlah Fasilitas operasional Pengujian kendaraan            | 6500 kendaraan (12 bulan)   | 894,957,300 | 6000 kendaraan (12 bulan)   | 877,658,300   | 5500 kendaraan (12 bulan)                | 1,105,000,000   |   |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  | Jumlah alat uji kendaraan yang tersedia                     | 0   |             | 0   |   | 0  |   |   |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  | Luas Kanopi yang terpasang                                  | 74.24 meter   |             | 0   |   | 0  |   |   |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |
|   |  | Jumlah HT yang tersedia                                     | 5 unit  |             | 0   |   | 0  |   |   |                           |                           |                           |                           |                |   |                    |               |







Tabel 6.1.4.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITAR TAHUN 2019-2021

| Tujuan   | Indikator Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Kode   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Dalu Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Tahun 2019 |                             | Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan Tahun 2019 |                                      | PD Penanggungjawab                | Lokasi    |               |               |               |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |  |   |  |   |   |  | K  | Rp.                         | K   | Rp.                                  |                                   |           |               |               |               |
| 1<br>Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi | 2<br>Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik | 3<br>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan    | 4<br>Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan | 5<br>5   | 6<br>2 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan | 7<br>Persentase Kelengkapan Jalan dalam Kondisi Baik      | 8  | 12   | 13                          | 14  | 18                                   | UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | Kotabitar |               |               |               |
|  |  |  |   |  |   |   | 75                                       | 9,132,048,715  | 95,6                        | 9,004,175,829   | Bidang Keselamatan Jalan             |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  |   |  |   |   | 05<br>01<br>5                            | 2  | Peringatan Peringatan Jalan | Jumlah Rambu yang tersedia                                    | 20 rambu                             |                                   |           | 1,530,221,800 | 38 rambu      | 1,475,425,614 |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Jumlah rambu yang terpelihara        |                                   |           | 2615 rambu    | 2611 rambu    |               |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Jumlah CCTV yang terpelihara         |                                   |           | 21 unit       | 21 unit       |               |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Panjang Marka Jalan yang terpelihara |                                   |           | 4900 m        | 5140 m        |               |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Jumlah cermin tikungan yang tersedia |                                   |           | -             | -             |               |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Panjang guardrail yang terpasang     |                                   |           | 44 meter      | 55 meter      |               |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Jumlah Warning light yang tersedia   |                                   |           | 3 titik       | 3 titik       |               |
|  |  |  |   |  |   |   |  |  |                             |   | Jumlah PIU yang tersedia             |                                   |           | 0 titik       | 7,528,750,215 |               |
| 05<br>02<br>5                                    | 2  | Peningkatan Prasarana Perhubungan                              | Jumlah Jaringan Listrik yang terpelihara                                    | 200 titik  | 7,601,826,915   | 209 titik   |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  |   | Jumlah lampu LED yang tersedia                   | 110 unit  | 110 unit  |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
| 08<br>00<br>5                                    | 2  | Program Peningkatan Kelahiran Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan                               | 94   | 894,957,300   | 92,2  | 761,323,299                              |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  |   | Jumlah fasilitas operasional Pengujian kendaraan | 6500 kendaraan (12 bulan)   | 6130 kendaraan (12 bulan)                                 |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
| 08<br>01<br>5                                    | 2  | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor                         | Jumlah alat uji kendaraan yang tersedia                                     | 0  | 894,957,300   | -   | 761,323,299                              |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  |   | Luas lahan uji terpasang                         | 74,24 meter   | 74,25 meter   |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  | Jumlah HT yang tersedia   | 5 unit   |   | 5 unit  |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  |   | Jumlah papan nama yang terbangun                 | 0   | -   |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |
|  |  |  | Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara                                  | 12 alat  |   | 12 alat   |  |  |                             |   |                                      |                                   |           |               |               |               |

| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekolah dan Terminal Kargo/Barang | 06 00 | 5 | 2 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan          | Persentase Prasrama dan Fasilitas Angkutan Sekolah dalam Kondisi Baik | 45    | 80                | 2,305,058,900 | 74                | 2,051,643,869 | Bidang Angkutan Jalan dan Terminal |
|---|-------|---|---|---|---|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
|   |       |   |   |   |   |       |                   |               |                   |               |                                    |
|   | 06 01 | 5 | 2 | Pengelolaan Perjalanan Angkutan Orang           | Jumlah abang becak yang terfasilitasi                                 |       | 1000 abang becak  | 1,782,415,900 | 1000 abang becak  | 1,556,083,053 |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah armada sekolah gratis dalam kondisi baik                       |       | 19 armada         |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi awal angkutan               |       | 0                 |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Pavingisasi jamat bus sekolah   |       | 1                 |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah GPS Bus sekolah yang terpasang                                 |       | 8 unit            |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah tenaga outsourcing yang terbayarkan gajinya                    |       | 0                 |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah halte yang terpelihara dengan baik                             |       | 8 halte           |               |                   |               |                                    |
|   | 06 02 | 5 | 2 | Pengelolaan Angkutan Barang dan Terminal        | Jumlah Fasilitas terminal yang terpelihara dengan baik                |       | 3 unit            | 522,643,000   |                   | 498,560,806   |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah jenis pemeliharaan terminal                                    |       | 3 jenis           |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah gedung yang terbangun  |       | 0                 |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah peningkatan terminal yang tersedia                             |       | 1 unit            |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah gapura terminal type C yang terbangun                          |       | 1 unit            |               |                   |               |                                    |
|   | 07 00 | 5 | 2 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas                    | 18,78 | 14,77             | 2,736,525,055 | 15,64             | 2,629,995,806 | Bidang Lalu Lintas                 |
|   | 07 01 | 5 | 2 | Manajemen Rekamata Lalu Lintas                  | Jumlah dokumen Kajian Manajemen Rekamata Lalu Lintas yang tersusun    |       | 2 kajian/ analisa | 1,723,160,000 | 2 kajian/ analisa | 1,702,361,534 |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah ganti rugi pembabatan tanah                                    |       | 1 lokasi          |               | 1 lokasi          |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah bidang tanah yang dibebaskan                                   |       | 0                 |               |                   |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah jenis fasilitas keselamatan yang terpasang/tersedia            |       | 3 jenis           |               |                   |               |                                    |
|   | 07 02 | 5 | 2 | Pengendalian dan Operasional                    | Jumlah pembinaan dan operasi gabungan                                 |       | 24 opgab          | 1,013,365,055 | 24 opgab          | 927,684,272   |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah sekolah yang tersosialisasi                                    |       | 15 sekolah        |               | 15 sekolah        |               |                                    |
|   |       |   |   |   | Jumlah peserta pembinaan kealulintasan                                |       | 0                 |               |                   |               |                                    |





Tabel 6.2  
Rencana Program/Kegiatan Pendukung Pelayanan beserta Realisasinya Tahun 2018  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

| KODE | URUSAN/IBDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | TARGET TAHUN 2018 |            |               |             | REALISASI TAHUN 2018 |               |         |          | CATATAN BERTING |
|------|---|------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|---------|----------|-----------------|
|      |   |                                    | LOKASI            | KINERJA    | ANGGARAN      | SUMBER DAWA | KINERJA              | ANGGARAN      | KINERJA | ANGGARAN |                 |
| 1    | 2   | 3                                  | 4                 | 5          | 6             | 7           | 8                    | 9             | 10      |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 100%       | 1,404,183,635 | DAU         | 100%                 | 1,247,873,890 |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 5 kali     | 1,000,000     | DAU         | 3 kali               | 77,000        |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 5 rekening | 187,800,000   | DAU         | 5 rekening           | 164,413,011   |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 30 unit    | 22,000,000    | DAU         | 18 unit              | 21,774,700    |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 25 jenis   | 21,618,600    | DAU         | 44 jenis             | 18,110,500    |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 11 jenis   | 18,062,500    | DAU         | 5 jenis              | 13,534,500    |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 13 jenis   | 8,943,810     | DAU         | 9 jenis              | 3,634,000     |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 8 jenis    | 15,799,645    | DAU         | 3 jenis              | 2,040,950     |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 2 jenis    | 12,000,000    | DAU         | 2 jenis              | 11,000,000    |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 9 paket    | 28,269,000    | DAU         | 6 paket              | 25,910,000    |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 69 kali    | 253,434,000   | DAU         | 76 kali              | 242,979,875   |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | -          | -             | DAU         | -                    | -             |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | -          | -             | DAU         | -                    | -             |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 8 jenis    | 44,559,800    | DAU         | 9 jenis              | 37,834,900    |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 11 jenis   | 189,053,600   | DAU         | 11 jenis             | 154,699,400   |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 6 gedung   | 330,279,880   | DAU         | 10 gedung            | 322,565,000   |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 30 unit    | 252,074,000   | DAU         | 20 unit              | 212,627,354   |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 8 unit     | 8,788,200     | DAU         | 4 unit               | 8,726,700     |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | 11 unit    | 10,500,600    | DAU         | 30 unit              | 7,946,000     |         |          |                 |
| 1    | 1.07.01   | 1                                  | DINAS PERHUBUNGAN | -          | -             | DAU         | -                    | -             |         |          |                 |

| 1            |   | 2       |   | 3  |  | 4   |                   | 5                 |  | 6                    |  | 7    |  | 8         |  | 9                    |  | 10 |  |
|--------------|---|---------|---|--|--|---|-------------------|-------------------|--|----------------------|--|------|--|-----------|--|----------------------|--|----|--|
| 1            | 7 | 1.07.01 | 2 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH                                 |  | Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota  |                   | DINAS PERHUBUNGAN |  | 210,607,200          |  | 100% |  | 100%      |  | 188,990,000          |  |    |  |
| 1            | 7 | 1.07.01 | 2 | 4  | Fasilitas Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional     | Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti   | DINAS PERHUBUNGAN | 3 even            |  | 49,951,000           |  | DAU  |  | 3 even    |  | 49,675,000           |  |    |  |
| 1            | 7 | 1.07.01 | 2 | 5  | Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD                       | Jumlah penyebarluasan informasi program / kegiatan PD   | DINAS PERHUBUNGAN | 10 kali           |  | 10,008,000           |  | DAU  |  | 10 kali   |  | 9,300,000            |  |    |  |
| 1            | 7 | 1.07.01 | 2 | 7  | Pengadaan Paksaan Dinas Beserta Perhitungannya                         | Jumlah jenis paksaan dinas beserta perhitungannya yang tersedia                                     | DINAS PERHUBUNGAN | 50 stel           |  | 150,648,200          |  | DAU  |  | 50 stel   |  | 130,015,000          |  |    |  |
| 1            | 7 | 1.07.01 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan | DINAS PERHUBUNGAN | 100%              |  | 2,210,000            |  |      |  | 100%      |  | 1,910,000            |  |    |  |
|              |   |         |   |  |  | Nilai SKM   |                   | Cukup             |  |                      |  |      |  |           |  |                      |  |    |  |
| 1            | 7 | 1.07.01 | 3 | 1  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah jenis dokumen yang tersusun  | DINAS PERHUBUNGAN | 3 laporan         |  | 1,260,000            |  | DAU  |  | 3 laporan |  | 960,000              |  |    |  |
| 1            | 7 | 1.07.01 | 3 | 3  | Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran                           | Jumlah jenis dokumen yang tersusun  | DINAS PERHUBUNGAN | 6 dokumen         |  | 950,000              |  | DAU  |  | 6 dokumen |  | 950,000              |  |    |  |
| <b>TOTAL</b> |   |         |   |  |  |   |                   |                   |  | <b>1,617,000,835</b> |  |      |  |           |  | <b>1,438,773,890</b> |  |    |  |





Tabel 6.3  
**RENCANA PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN TAHUN 2019 DAN RENCANA PERKIRAAN MAJU SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2020-2021**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021**

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Program/Kegiatan Tahun |               |        |               |        |               | Kondisi pada Akhir Periode Renstra (2021) |               | PD Penanggungjawab |   |     |
|------|----------------------|---|-----------|--|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|--------------------|---|-----|
|      |                      |   |           |  | 2019                   |               | 2020   |               | 2021   |               | Target                                    | Rp.           |                    | Target                                    | Rp. |
|      |                      |   |           |  | Target                 | Rp.           | Target | Rp.           | Target | Rp.           |   |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 1   | 4         | 5  | 8                      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14  | 15            | 16                 | Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Blitar |     |
| 1    | 1                    | 2   | %         | 100                                      | 100                    | 1,556,021,600 | 100    | 1,626,807,400 | 100    | 2,367,600,000 | 100                                       | 2,367,600,000 | 2,367,600,000      |   |     |
| 1    | 1                    | 3   | kali      | 25                                       | 25                     | 61,088,200    | 10     | 84,040,600    | 25     | 90,000,000    | 25  | 90,000,000    | 90,000,000         |   |     |
| 1    | 1                    | 4   | jenis     | 6  | 6                      |               | 6      |               | 6      |               | 6   |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 5   | lembar    | 2500                                     | 2500                   |               | 2500   |               | 2500   |               | 2500                                      |               | 2500               |   |     |
| 1    | 1                    | 6   | eks       | 36                                       | 36                     |               | 48     |               | 48     |               | 48  |               | 48                 |   |     |
| 1    | 1                    | 7   | dus       | 300                                      | 300                    |               | 1000   |               | 1500   |               | 1500                                      |               | 1500               |   |     |
| 1    | 1                    | 8   | jenis     | 45                                       | 45                     |               | 17     |               | 17     |               | 17  |               | 17                 |   |     |
| 1    | 1                    | 9   | kali      | 122                                      | 122                    | 355,870,000   | 140    | 300,000,000   | 145    | 375,000,000   | 145                                       | 375,000,000   | 375,000,000        |   |     |
| 1    | 1                    | 10  | kendaraan | 35                                       | 35                     | 1,136,593,800 | 48     | 1,236,463,100 | 48     | 1,900,000,000 | 48  | 1,900,000,000 | 1,900,000,000      |   |     |
| 1    | 1                    | 11  | komponen  | 12                                       | 12                     |               | 14     |               | 14     |               | 14  |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 12  | unit      | 6  | 6                      |               | 6      |               | 6      |               | 6   |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 13  | jenis     | 8  | 8                      |               | 12     |               | 7      |               | 7   |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 14  | gedung    | 3  | 3                      |               | 3      |               | 3      |               | 4   |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 15  | unit      | 35                                       | 35                     |               | 40     |               | 40     |               | 115                                       |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 16  | unit      | 5  | 5                      |               | 25     |               | 25     |               | 55  |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 17  | unit      | 5  | 5                      |               | 70     |               | 20     |               | 95  |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 18  | jenis     | 20                                       | 20                     |               | 7      |               | 20     |               | 47  |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 19  | unit      | 79                                       | 79                     |               | 55     |               | 3      |               | 137                                       |               |                    |   |     |
| 1    | 1                    | 20  | unit      | 2  | 2                      |               | 0      |               | 3      |               | 5   |               |                    |   |     |





Tabel 6.3.1  
**RENCANA PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN TAHUN 2019 DAN RENCANA PERKIRAAN MAJU SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2020-2021**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021**

| Kode | Program dan Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)       | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Program/Kegiatan Tahun 2019 |               | Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2019 |               | PD Penanggungjawab                        |
|------|-------------------------------|---|-----------|--|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---|
|      |                               |   |           |  | K                                  | Rp.           | K                                     | Rp.           |   |
| 1    | 2                             | 3   | 4         | 5  | 8                                  | 9             | 10                                    | 11            | 12  |
| 1    | PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN | PERSENTASE KECUKUPAN PELAYANAN PERKANTORAN                      | %         | 100                                      | 100                                | 1,556,021,600 | 100                                   | 1,420,475,341 | Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Blitar |
| 1    | 1 1.07.0 1 1                  | Jumlah kali korespondensi                                       | kali      |  | 25                                 | 61,088,200    | 9                                     | 60,027,500    |   |
|      |                               | Jumlah jenis barang cetakan                                     | jenis     |  | 6                                  |               | 8                                     |               |   |
|      |                               | Jumlah jenis penggandaan  | lembar    |  | 2500                               |               | 2689                                  |               |   |
|      |                               | Jumlah jenis bahan bacaan                                       | eks       |  | 36                                 |               | 36                                    |               |   |
|      |                               | Jumlah dus makanan yang tersedia                                | dus       |  | 300                                |               | 1295                                  |               |   |
|      |                               | Jumlah Jenis ATK  | jenis     |  | 45                                 |               | 49                                    |               |   |
| 1    | 7 1.07.0 1 2                  | Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang diikuti | kali      |  | 122                                | 355,870,000   | 137                                   | 355,782,892   |   |
| 1    | 7 1.07.0 1 4                  | Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya           | kendaraan |  | 35                                 | 1,136,593,800 | 42                                    | 1,002,199,349 |   |
|      |                               | Jumlah Komponen instalasi/ listrik yang tersedia                | komponen  |  | 12                                 |               | 12                                    |               |   |





|              |   |        |   |  |  |         |     |                      |     |                      |             |
|--------------|---|--------|---|--|--|---------|-----|----------------------|-----|----------------------|-------------|
| 1            | 7 | 1.07.0 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah | %       | 100 | 27,624,800           | 100 | 26,123,000           |             |
| 1            | 7 | 1.07.0 | 3 | Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun           | dokumen | 5   | 27,624,800           | 5   | 26,123,000           |             |
|              |   |        | 1 |  | Jumlah dokumen SKM yang tersusun                                 | dokumen | 1   |                      | 1   |                      |             |
| <b>TOTAL</b> |   |        |   |  |  |         |     | <b>1,761,000,200</b> |     | <b>1,619,674,341</b> | <b>0.92</b> |

Blitar, Januari 2020  
 Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar  

 PRAYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19671224 198903 1 005

MATRIK RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITAR  
TAHUN 2016 - 2021

VISI : Masyarakat Kota Bitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021  
MISI : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

| Uraian                                      | Indikator  | Formula Perhitungan   | Tujuan       |        |      |      |      | Uraian | Indikator | Formula Perhitungan   | Sasaran  |        |      |       |      | Ket. |      |  |  |   |
|---|--|---|--------------|--------|------|------|------|--------|-----------|---|--|--------|------|-------|------|------|------|--|--|---|
|   |  |   | Kondisi Awal | Target |      |      |      |        |           |   | Kondisi Awal   | Target |      |       |      |      |      |  |  |   |
|   |  |   |              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 |        |           |   |  | 2019   | 2020 | 2021  | 2015 |      | 2016 | 2017   | 2018   | 2019  |
| Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik              | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik dibagi Jumlah Prasarana dan Fasilitas perhubungan dikali 100% | 75           | 77.8   | 80.5 | 83.8 | 87   | 89.8   | 93        | Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana Perhubungan  | Ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan dibagi jumlah ruas jalan dikali 100% | 75     | 80   | 83.75 | 90   | 93   | 95   | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan<br>- Program Peningkatan Kelakian Pengoperasian Kendaraan Bermotor      | Program                                      |   |
|   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Sekolah dan Terminal cargo/barang | Jumlah Prasarana dan Fasilitas perhubungan dikali 100%  | 70           | 70     | 71   | 72   | 73   | 74     | 75        | Load faktor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis   | Jumlah penumpang angkutan sekolah gratis dibagi Kapasitas kendaraan sekolah gratis dikali 100%   | 70     | 70   | 71    | 72   | 73   | 74   | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan angkutan sekolah serta pelayanan di terminal barang/cargo yang memadai | Kebijakan                                    | - Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan<br>- Program Peningkatan Kelakian Pengoperasian Kendaraan Bermotor |
|   | Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar          | Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik   | 30           | 30     | 32   | 34   | 36   | 38     | 40        | Pemanfaatan Terminal Cargo/barang yang dimanfaatkan dibagi luas total Terminal Cargo/barang dikali 100% | Luas Terminal Cargo/barang yang dimanfaatkan dibagi luas total Terminal Cargo/barang dikali 100% | 30     | 30   | 32    | 34   | 36   | 38   | 40   | Penerapan manajemen dan rakayasa lalu lintas | - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas   |





**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Blitar  
Tahun 2014 s.d 2019**

| No  | Uraian  | Target |      |      |        |        | Realisasi |         |         |         |         | Tingkat Capaian |         |         |         |         |
|-----|---|--------|------|------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|     |   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017   | 2018   | 2019      | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018            | 2019    | 2017    | 2018    | 2019    |
| 1   | Presentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik           |        |      |      | 80,50% | 83,75% | 87,00%    |         |         |         | 89,12%  | 94,81%          | 95,61%  | 110,71% | 113,21% | 109,90% |
| 1.1 | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik               |        |      |      |        |        |           |         |         |         |         | 126,508         | 127,897 |         |         |         |
| 1.2 | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                                  |        |      |      |        |        |           |         |         |         |         | 133,429         | 133,766 |         |         |         |
| 2   | Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan |        |      |      | 80,00% | 83,75% | 90,00%    | 61,00%  | 66,98%  | 70,50%  | 74,89%  | 78,59%          | 80,53%  | 93,61%  | 93,84%  | 89,48%  |
| 2.1 | Jumlah ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan     |        |      |      |        |        | 164,752   | 180,902 | 190,399 | 202,255 | 212,255 | 217,485         |         |         |         |         |
| 2.2 | Jumlah ruas jalan   |        |      |      |        |        | 270,070   | 270,070 | 270,070 | 270,070 | 270,070 | 270,070         | 270,070 | 270,070 | 270,070 | 270,070 |
| 3   | Load Factor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis                               |        |      |      | 71,00% | 72,00% | 73,00%    | 172,30% | 161,05% | 139,16% | 80,56%  | 80,23%          | 74,34%  | 113,46% | 111,43% | 101,84% |
| 3.1 | Jumlah Penumpang angkutan sekolah gratis                                    |        |      |      |        |        | 18,608    | 69,572  | 60,117  | 59,163  | 76,883  | 79,935          |         |         |         |         |
| 3.2 | Kapasitas Kendaraan Sekolah Gratis  |        |      |      |        |        | 10,800    | 43,200  | 43,200  | 73,440  | 95,832  | 107,520         |         |         |         |         |
| 4   | Pemanfaatan Terminal kargo/barang   |        |      |      | 32,00% | 34,00% | 36,00%    | 19,32%  | 23,62%  | 23,62%  | 24,04%  | 29,39%          | 29,39%  | 75,12%  | 86,43%  | 81,63%  |
| 4.1 | Luas terminal Kargo/Barang yang dimanfaatkan                                |        |      |      |        |        | 2,496     | 3,052   | 3,052   | 3,106   | 3,797   | 3,797           |         |         |         |         |
| 4.2 | Luas Total terminal   |        |      |      |        |        | 12,921    | 12,921  | 12,921  | 12,921  | 12,921  | 12,921          | 12,921  | 12,921  | 12,921  | 12,921  |
| 5   | Peralihan Wahana Tata Nugraha   |        |      |      | WTN    | WTN    | WTN       | WTN     | WTN     | WTN     | NA      | NA              | WTN     | NA      | NA      | 100,00% |

